

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Santoso. *Hukum Moral Dan Keadilan*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.

Dwi Haryadii. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 2018.

Marwiyah, Siti. *Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2022.

Ridham. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by 13. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Septiana, Anis Ribcalia, Supratno, Feronica Monica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, Muhammad Rais Rahmat Razak, et al. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. E-Book (Researchgate.Net)*, 2023.

Jurnal:

A, Fathurahman. “Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial Di Indonesia,” 2020.

Fattah Damanhuri . “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013):.

Dina Novitasari, Bilgis Yulia Febri, Salma Angelita Dewi Sandra, Olivian Yudha Pratama. “Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah Mengenai Izin Tambang Bagi Ormas Keagamaan Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah Mengenai Izin Tambang Bagi Ormas Keagamaan,” no. 25

(2024):

Fitria, Wardatil, Hartati, Baidawi. “Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Daerah Atas Izin Usaha Pertambangan Batubara PT Surya Global Makmuri ‘Studi Kasus Di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun),’” 2021.

Nur, Sri, and Hari Susanto. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 23.

Putera, Ilham Rachmat. “Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM.” *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 8 (2024):

Putri, Mutiara Fajriatul Izza, Viorelia Nabila Tasya, and Amanda Destiana Prastika. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia: AnalisisRegulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (July 2024):

Iriawan, Hermanu. *Teori KebijakanPublik. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2024.

Kajian, Jurnal, Pendidikan Kewarganegaraan, and Pelanggaran Ham. “Civilia : Civilia :” 3 (2024):

Kusmayanti, Hazar, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Dede Kania, and Rafan Darodjat. “Legal Politics of the Existence of Customary Courts in Civil Procedure

Law.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 13, no. 1 (2024):

Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, and Viorelia Nabila Tasya. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 7, no. 1 (2017):

Rachmawati, D. “Reformasi Dan Kebangkitan Ormas Di Indonesia Pasca-Orde Baru,” 2019.

Tuti Widyaningrum, Muhammad Rifqi Hamidi. “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia” 4, no. 3 (2023)

Eko Nuriyatman, and Trias Hernanda². “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tentang Kegiatan Pertambangan” 1, no. 1 (2020): 23. <https://doi.org/10.31857/s0320930x20040088>.

Nurlathifa, Aziza. “Pemberian Izin Pertambangan Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah,” 2025.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Peraturan
atas Presiden nomor 70 tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi
penataan investasi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara